



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MESUJI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MESUJI	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuat</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td></td> <td>  FERIZAL LEVI SUKMANA Pj. Bupati Mesuji </td> </tr> <tr> <td>Nama SOP</td> <td></td> <td>Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)</td> </tr> </table>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuat	:		Tanggal Revisi	:		Tanggal Pengesahan	:		Disahkan oleh		 FERIZAL LEVI SUKMANA Pj. Bupati Mesuji	Nama SOP		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
Nomor SOP	:																		
Tanggal Pembuat	:																		
Tanggal Revisi	:																		
Tanggal Pengesahan	:																		
Disahkan oleh		 FERIZAL LEVI SUKMANA Pj. Bupati Mesuji																	
Nama SOP		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)																	
Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji; 4 Peraturan Bupati Mesuji Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Seluruh Wewenang Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pelayanan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji; 5 Peraturan Bupati Mesuji Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.	Kualifikasi Pelaksana 1. Mampu menguasai/mengoperasikan aplikasi Online Single Submission OSS. 2. Mampu dan menguasai perizinan berusaha Sektor Transportasi. 3. Mampu mengoperasikan komputer.																		
Keterkaitan 1 SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah Nomor Induk Berusaha (NIB); SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Rendah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 2 Sertifikat Standar (SS); SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat 3 Standar (SS); SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Tinggi Nomor Induk Berusaha (NIB), IZIN dan Sertifikat 4 Standar (SS); 5 SOP Pengaduan 6 SOP Indek Kepuasan Masyarakat	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer; 2. Internet; 3. Ruang Pelayanan 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor; 6. Scanner																		
Peringatan 1. SOP ini berlaku pada kondisi normal.	Pencatatan dan pendataan Disimpan sebagai data elektronik																		

FORMULIR URAIAN KERJA / PROSEDUR

A. Data Kegiatan

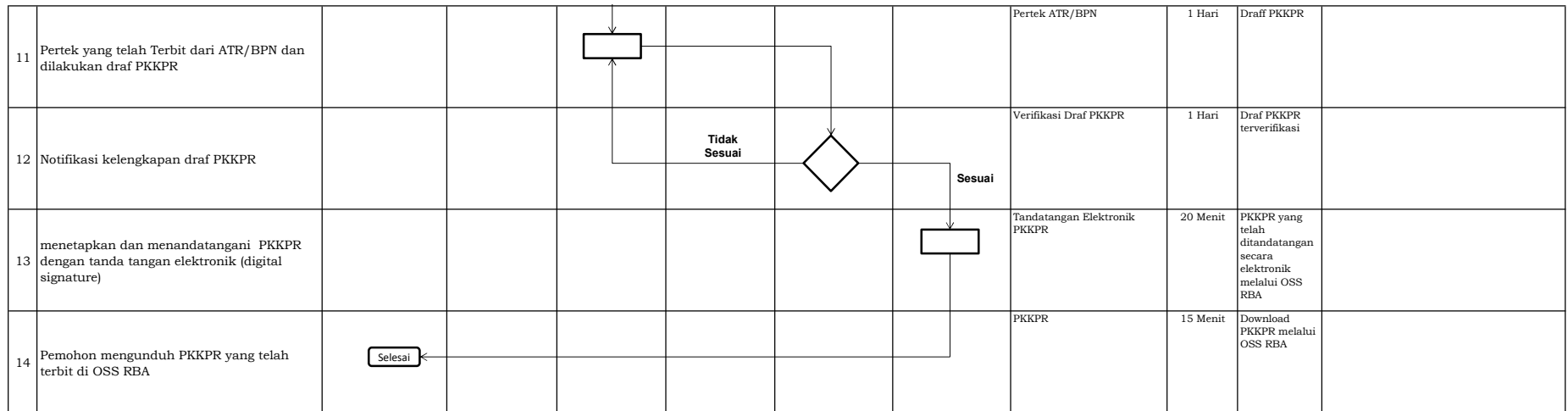
1. Judul SOP	: Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
2. Out Put	: Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
3. Pelaksana	: 1. Pemohon 2. Lembaga OSS 3. GISTARU PKKPR 4. Koordinator Perizinan 5. Kepala Dinas

B. Pelaksana Kegiatan

No	Uraian Kerja / Prosedur
1	mengajukan permohonan Izin PKKPR Berusaha melalui Sistem OSS RBA
2	menerima berkas dari pemohon pemenuhan persyaratan PKKPR yang diteruskan ke Gistaru PKKPR
3	melakukan verifikasi Kelengkapan Persyaratan pemohon di Gistaru PKKPR
4	Sistem OSS RBA Mengirimkan Tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke akun Pelaku Usaha
5	Pemohon membayarkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan melengkapi persyaratan pendaftaran pertek
6	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah dibayarkan oleh Pemohon
7	Penjadwalan dan pembuatan surat tugas yang ditandatangani oleh ketua FPR untuk melakukan verifikasi lapangan
8	Penjadwalan dan pembuatan surat undangan Rapat FPR yang ditandatangani oleh ketua FPR
9	FPR melakukan rapat pembahasan dan tinjauan lapangan (bila diperlukan)
10	Mengupload Berita Acara Rapat
11	Pertek yang telah Terbit dari ATR/BPN dan dilakukan draf PKKPR
12	Notifikasi kelengkapan draf PKKPR
13	menetapkan dan menandatangani PKKPR dengan tanda tangan elektronik (digital signature)
14	Pemohon mengunduh PKKPR yang telah terbit di OSS RBA

FLOWCHART : MEKANISME PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	GISTARU PKKPR	TIM FPR	Koordinator Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengajukan permohonan Izin PKKPR Berusaha melalui Sistem OSS RBA	Mulai						Melakukan Permohonan PKKPR	15 Menit	Permohonan PKKPR	
2	menerima berkas dari pemohon pemenuhan persyaratan PKKPR yang diteruskan ke Gistaru PKKPR							Upload Berkas Permohonan di OSS RBA	10 Menit	Berkas Permohonan yang telah terupload di OSS RBA	
3	melakukan verifikasi Kelengkapan Persyaratan pemohon di Gistaru PKKPR		Tidak Sesuai					Menverifikasi Berkas Permohonan yang telah terupload di OSS RBA	2 Hari	Berkas Permohonan yang telah terverifikasi	
4	Sistem OSS RBA Mengirimkan Tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke akun Pelaku Usaha			Sesuai				Surat Perintah Setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	6 Hari	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
5	Pemohon membayarkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan melengkapi persyaratan pendaftaran pertek							Membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Fotocopy Sertifikat Tanah/HGU, Fotocopy KTP, Fotocopy SPPT PBB, Akta Notaris	2 Hari	Upload Berkas Persyaratan Pertek dan Bukti Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
6	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah dibayarkan oleh Pemohon							Bukti Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1 Hari	Berkas Persyaratan Pertek terupload	
7	Penjadwalan dan pembuatan surat tugas yang ditandatangani oleh ketua FPR untuk melakukan verifikasi lapangan							Melaksanakan verifikasi lapangan	2 hari	Verifikasi Lapangan	Survey Lokasi
8	Penjadwalan dan pembuatan surat undangan Rapat FPR yang ditandatangani oleh ketua FPR							Rekap Bahan Rapat, Undangan Rapat	1 Hari	Undangan Rapat	
9	FPR melakukan rapat pembahasan							Berita Acara Rapat FPR dan Berkas Permohonan	4 Hari	Berita Acara Rapat FPR dan Berkas Permohonan	
10	Mengupload Berita Acara Rapat							Berita Acara Rapat FPR	1 Hari	Pertek ATR/BNP	




 P. BUPATI MESUJI,
 FEEHIZAL LEVI SUKMANA